

## DAFTAR REFERENSI

- Afrizal, S. H., Handayani, P. W., Hidayanto, A. N., Eryando, T., Budiharsana, M., and Martha, E. (2019). "Barriers and challenges to Primary Health Care Information System (PHCIS) adoption from health management perspective: a qualitative study". *Informatics in Medicine Unlocked*, 17, 100198.
- Dunia, Firdaus Ahmad., Abdullah, Wasilah., dan Sasongko, Catur. 2019. *Akuntansi Biaya Edisi-5*. Penerbit Salemba empat.
- Bastian, Indra. 2018. *Akuntansi Kesehatan (Pengelolaan Organisasi Kesehatan)*. penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Cahyati, Peni. 2021. "The Model Of Patient Satisfaction And Trust: A Study At Bpjs Patient." *Dinasti International Journal of Education Management and Social Science* 2.3: 513-526. E-ISSN : 2686-6331, P-ISSN : 2686-6358
- Ermawati, Emmy 2018. Analisis Kinerja Keuangan Klinik Husada Mulia Kabupaten Lumajang. *E- Jurnal STIE Widdya Gama Lumajang E-ISSN: 2598-6074, P-ISSN: 2598-2885*
- Gitosudarmo, Indriyo. *Pengantar Bisnis, Edisi II*, Yogyakarta : BPFE, 2015. Jakarta : Prenhallindo
- Keunikan Organisasi Pelayanan Kesehatan. 2013. <https://kespelsemarang.id/bacaberita.php?milihndi=73>. Di akses pada tanggal 5 September 2021
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 71. 2013. *Tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 69. 2013. *Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 2052. 2011. *Tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 46. 2015. *Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Nomor 12. 2013. *Tentang Jaminan kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- Puspitasari, Vita Indah, Novrida Qudsi Lutfillah, and Anna Isrowiyah. 2021. "Mengungkap Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Rumah Sakit Pemerintah." *Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen* 5.1: 27-36.
- Rarasati, Desi Hanggono. 2017. Dampak Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan di Kota Malang. *Jurnal Politik Muda*, 6 (1). Pp.34-40 ISSN 2302-8068)
- Suhartoyo 2018, Klaim Rumas Sakit kepada BPJS Kesehatan berkaitan Dengan Rawat Inap dengan Sistem ina-cbgs. *Jurnal Administrative Law & Governance Vol.1 edisi khusus 1 2018 ISSN 2621 – 2781*
- Supriyono 2018. *Akuntansi Biaya 1 Edisi Kedua*. Penerbit BPFE-Yogyakarta.
- Syafii, M., Ulum, B., Suparman, P., Rahayu, D. I. and Syasindy, N. B. (2020). "The Effect Of Financial Performance On The Company's Share Price: A Case Study Indonesian". *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(8), 1055-1071.
- Tampi, Andreas G. Ch., Kawung, Evelin J.R., dan Tumiwa, Juliana W. 2016. Dampak Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Terhadap Masyarakat di Kelurahan Tingkulu. *E – Jurnal Acta Diurma Volume V. No. 1*
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 26. 2007. *Tentang Penataan Ruang*. Jakarta : Pemerintah Pusat.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 17. 2003. *Tentang Keuangan Negara*. Jakarta : Pemerintah Pusat.
- Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20. 2013. *Tentang Pendidikan Kedokteran*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 24. 2011. *Tentang Badan Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 28. 2002. *Tentang Bangunan Gedung*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 29. 2004. *Tentang Praktik Kedokteran*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 32. 2009. *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 36. 2009. *Tentang Kesehatan*. Jakarta : Pemerintah Pusat.

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 20. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta : Pemerintah Pusat

Presiden Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 40. 2004. *Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta : Pemerintah Pusat.